SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN 10 PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi pemerintah daerah Tahun 2023 dan pencapaian target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023, perlu menetapkan 10 proyek strategis Provinsi Papua Tengah

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan 10 Proyek Strategis Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan ...../3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Pengantar Biro Pengadaan Barang/Jasa tanggal 21 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 10 Proyek Strategis Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :...../4

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 222 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

10 PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

NO	KEGIATAN/LOKASI	ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Jalan Kalibobo-Bandara Karadiri	46,847,036,915.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.	Pembangunan Jalan Sekunder Kawasan Perkantoran Ibukota Provinsi Papua Tengah	37,500,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.	Peningkatan Jalan Masuk Bandara Karadiri	36,400,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4.	Pembangunan Jalan Akses Kawasan Ibukota Provinsin Papua Tengah	36,000,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Pembangunan VIP Room Bandara Nabire Baru dan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung VIP Room	30,928,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan
6.	Pembangunan Jalan Primer Kawasan Perkantoran Ibukota Provinsi Papua Tengah	27,985,791,985.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Land Clearning/Pembukaan Lahan Area Perpanjangan Landasan Pacu/Runway Bandara Nabire Baru	19,893,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Perhubungan

1	2	3	4	5
8.	Pembangunan Jalan Topo-Menou-Mapia	18,306,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat
9.	Pembangunan Gedung Sekolah SLB Negeri Nabire	15,500,000,000.00	APBD Provinsi	Dinas Pendidikan dan
10.	Pembangunan 20 (dua Puluh) Kamar Bagi Dokter dan Perawat Jaga dan Taman Bagi RSUD Nabire.	14,257,274,500,00	APBD Provinsi	Dinas Kesehatan, Penduduk dan Keluarg

Pj. GUBERNUR PAPUA TENG
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006